

**PENDEKATAN EKONOMI SPASIAL UNTUK
KEJAHATAN HAK MILIK DI WILAYAH POLDA
JAWA BARAT**

C. Ili



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Gelora Islami Putri
2015110058**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

**SPATIAL ECONOMICS APPROACH TO
PROPERTY CRIME IN JAWA BARAT REGIONAL
POLICE**

Handwritten signature



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics**

**By
Gelora Islami Putri
2015110058**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENDEKATAN EKONOMI SPASIAL UNTUK
KEJAHATAN HAK MILIK DI WILAYAH POLDA JAWA
BARAT**

Oleh:

**Gelora Islami Putri
2015110058**

Bandung, Januari 2019

Ketua Program Sarjana Ekonomi Pembangunan,



Dr. Miryam B. L. Wijaya

Pembimbing,



Siwi Nugraheni, Dra., M.Env.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Gelora Islami Putri
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 November 1997
NPM : 2015110058
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

PENDEKATAN EKONOMI SPASIAL UNTUK KEJAHATAN HAK MILIK DI
WILAYAH POLDA JAWA BARAT

Pembimbing : Siwi Nugraheni, Dra., M.Env.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 17 Januari 2019

Pembuat pernyataan:



(Gelora Islami Putri)

ABSTRAK

Kejahatan hak milik merupakan bentuk kejahatan dengan motif ekonomi. Penelitian mengenai kejahatan dari perspektif ekonomi diperlukan di Indonesia karena masih terbatasnya studi mengenai perilaku kejahatan dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi, padahal jumlah tindakan kejahatan hak milik di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan spasial. Polda Jawa Barat termasuk pada tiga kepolisian daerah dengan kejahatan hak milik tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel sosial-ekonomi yang signifikan memengaruhi tindakan kejahatan hak milik dan melihat ketergantungan spasial dalam kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Melalui analisis regresi model OLS dan regresi spasial model SAR, hasil penelitian pada periode 2012-2015, ditunjukkan signifikansi variabel yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jumlah pengangguran, rasio gini dan persentase penyelesaian kasus memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kejahatan hak milik dan sesuai dengan hipotesis. Sedangkan, jumlah polisi, PDRB per kapita dan persentase penduduk miskin memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap kejahatan hak milik, namun tidak sesuai dengan hipotesis. Melalui analisis spasial menggunakan indeks Moran global, hasil penelitian ini menemukan bahwa jumlah kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat tidak memiliki autokorelasi spasial. Melalui LISA, hasil penelitian pada periode 2012-2015, menunjukkan signifikansi wilayah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Dari 20 kabupaten/kota di wilayah Polda Jawa Barat, hanya ada empat kabupaten yang signifikan berkorelasi spasial dengan tetangganya, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Purwakarta.

Kata kunci: Kejahatan hak milik, faktor sosial-ekonomi, analisis spasial, Polda Jawa Barat

ABSTRACT

Property crime is a crime with economic motives. Research on crime from an economic perspective is needed in Indonesia because of the limited study of crime behavior associated with social and economic conditions. In fact, the number of property crime in a region can be influenced by socio-economic and spatial factors. Jawa Barat Regional Police are among the three regional police with the highest property crime in Indonesia. This study aims to determine the socio-economic variables that significantly influence property crime and see spatial dependence in property crime cases in Jawa Barat Regional Police. Through OLS model regression analysis and SAR spatial regression models, the results of the study in the period 2012-2015, indicate the significance of the variables that vary each year. The number of unemployment, gini ratio and clearance rate have a statistically significant influence on property crime and in accordance with the hypothesis. Meanwhile, the number of police, per capita GRDP and the percentage of poor people have a statistically significant influence property crime, but not in accordance to the hypothesis. Through spatial analysis using the global Moran index, the results of this study found that the number of property crime cases in Jawa Barat Regional Police did not have spatial autocorrelation. Through LISA, the results of research in the period 2012-2015, indicate the significance of different regions each year. In 20 regencies/cities in Jawa Barat Regional Police, only four regencies have significant spatial correlations with their neighbors, namely Majalengka Regency, Kuningan Regency, Sukabumi Regency, and Purwakarta Regency.

Keywords: *Property crime, socio-economic factors, spatial analysis, Jawa Barat Regional Police*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendekatan Ekonomi Spasial untuk Kejahatan Hak Milik di Wilayah Polda Jawa Barat”. Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki di penelitian di masa yang akan datang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari keluarga besar Ekonomi Pembangunan UNPAR dan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak dan Mamah tersayang, Sugiarto dan alm. Roslina Hartini. Kedua kakak tercinta, Sulistio Agus Salam dan Najiman Irfan, serta kakak ipar terkasih, Indah Ismayanti. Terima kasih atas doa, usaha, bimbingan, arahan, perhatian, nasihat, dukungan materi dan non-materi. Mereka yang mengajarkan saya kesabaran, kekuatan, dan ketabahan, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana.
2. Ibu Siwi Nugraheni, M.Env. selaku inspirator penulis dan dosen pembimbing yang sabar, selalu memberi semangat, nasihat, kritik, dan saran untuk kemajuan saya.
3. Ibu Januarita H., Ph.D. selaku dosen yang saya anggap sebagai ko-pembimbing karena saya banyak meminta nasihat dan bantuan mengenai penjelasan metode untuk skripsi saya.
4. Ibu Hilda Leilani Masniaritta Pohan, Ph.D. selaku dosen yang selalu berbagi informasi, cerita, pengalaman, arahan kepada saya agar dapat berkembang lebih baik lagi di segi *hard-skill* dan *soft-skill*.
5. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya selaku dosen wali yang memberi arahan, menerima konsultasi di setiap perwalian, memperkuat mental saya untuk belajar, serta dosen yang mengajarkan betapa pentingnya belajar untuk belajar di setiap kesempatan.
6. Pak M. Ishak S., MSP., Ibu Ivantia S. M., Ph.D., Ibu Noknik K. H., M.P., Pak Aswin Masudi, M.SE., Pak Fransiscus Haryanto, Dr., Dian Fordian, M.Si., Kak Charvin Lim, M.Sc., Pak Martinus Yuwana, Dr., dan Pak Yusuf Munawar, M.E., selaku dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, serta Pak Yohanes Eko Winarno selaku staf administrasi Tata Usaha Fakultas Ekonomi.

7. Edya Ariana Utami sebagai *partner* seperjuangan dari semester 1 yang selalu menjadi rekan sekelompok, teman berdiskusi dan belajar, penyedia tempat untuk menginap dan makan, sahabat di kajian EKL yang perhatian dan selalu berbagi kebahagiaan.
8. Monica Estasya, Rifa Sofiawati, Efryda Sinaga, Shabica Yaamani Nur, Rina Nur Silawati selaku sahabat yang berbagi keseruan, suka dan duka, teman curhat, dan teman seperjuangan di dunia perkuliahan.
9. Sahabat dan keluarga EP 2015 yang mengisi warna-warni kegiatan perkuliahan yaitu: Ditya, Talia, Ely, Sarah, Marine, Iman, Nada, Sindy, Laras, Mathew, Arta, Dani Yesfin, Hanna, Dani Satria, Windy, Novri, Nia, Inal, Nadine, Kezia, Abram, Raisa, Lizzy, Nico, Nayla, Adira, Billy, Agung, Widodo, Adam, Farel, Devin, Andrian, Astri, Cipman, Audi, Yudha, Ayub, Greg, Tama, Irfon, Sisi, Insan, Bianda, Soterida, Vincent.
10. Keluarga besar Ekonomi Pembangunan yaitu Kak Ruth, Kak Nurul, Kak Getha, Kak Dikcit, Kak Faza, Kak Faisal, Kak Mariska, Kak Rania, Kak Kaka, Kak Nadia, Kak Tami, Kak Opi, Kak Sarah, Kak Andrew, Kak Miun, Kak Mimin, Kak Arini, Kak Mer, Kak Bilaa, Dea, Alya, Rina, Venny, Otniel, Rere, Nadia, serta teman-teman angkatan 2012, 2013, 2014, 2016, dan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
11. Teman-teman dan kakak-kakak HMPSEP 2016/2017 yang memberi kesempatan dan mengajarkan saya berorganisasi untuk mengasah *soft-skill*, terutama orang-orang di Departemen Pendidikan yaitu Kak Radhit, Kak Rere, Kak Naufal, Efryda, dan Mathew.
12. Rekan-rekan MPM 2017/2018 yang menemani setiap rapat dan penyelesaian masalah di Persatuan Mahasiswa UNPAR, terutama MPM Fakultas Ekonomi yaitu Rosaline, Deniel dan Sarah yang saling mengerti dan bertanggung jawab saat masing-masing orang sedang ada kesibukan. Selain itu, terima kasih Carlo yang sangat membantu saya di *Internal Inspector* dan Tiara yang selalu jadi teman curhat di MPM.
13. Teman-teman UKM sepak bola (futsal putri) yang selalu menghibur di setiap kesempatan dari penulis menjadi mahasiswa baru sampai mengerjakan skripsi. Terima kasih untuk Kak Minceu (Rizna Triyana) sebagai alumni EP 2009 yang selalu berbagi cerita dan pengalaman mengenai futsal dan perkuliahan di EP, serta Putri dan Jessica yang telah berkenan mengurus futsal putri di periode setelah saya.

14. Jajaran Biro Kemahasiswaan dan Alumni yaitu Pak Herry, Mba Ayu, Mas Gugie, Mas Gun yang membantu saya menjalankan kegiatan organisasi mahasiswa dan kelancaran beasiswa.
15. Dianisa Aska Nadhira dan keluarga yang sangat perhatian, menerima keluhan saya, dan membantu masa-masa awal perkuliahan saat diterima di UNPAR. Terima kasih telah menjadi sahabat yang mengingatkan bahwa kita tidak boleh hanya mengejar kebahagiaan dunia, tetapi harus diimbangi dengan ketaatan agama untuk mencapai kesuksesan.
16. Sahabat-sahabat saya semasa sekolah yaitu Vine, Siti, Alya, Dhiaz, Kania, Mita, Dwi, Ditta, Risnanda, dan Nuke yang berbagi cerita, keseruan, perjuangan, dan dukungan saat sekolah dan kuliah.
17. Bagian Renmin dan Binopsnal Reskrimum, Renmin dan Binkar Biro SDM, Kopol Etie, Kombes Pol (Purn) Kuswendi, AKBP (Purn) Atmini, Pak Egi Lucky, dan Pak Arman dari Polda Jawa Barat. Terima kasih atas informasi dan bantuan untuk mengarahkan saya mendapatkan dan memahami data mengenai kejahatan hak milik di Polda Jawa Barat.
18. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi pembaca atau dapat dilakukan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

Bandung, 17 Januari 2019

Gelora Islami Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Pemikiran	6
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
1.1 Kejahatan	8
1.2 Keterkaitan Kejahatan dengan Ekonomi.....	8
1.3 Faktor-faktor Sosial-Ekonomi dan Kejahatan.....	12
1.3.1 Pendapatan dan Kejahatan	13
1.3.2 Ketimpangan Pendapatan dan Kejahatan.....	13
1.3.3 Kemiskinan dan Kejahatan	14
1.3.4 Pengangguran dan Kejahatan	14
1.3.5 Upaya Pencegahan dan Kejahatan	14
1.4 Analisis Spasial Tindak Kejahatan	15
1.4.1 Hubungan Ketetanggaan (<i>Neighborhood</i>)	15
1.4.2 Jarak (<i>Distance</i>)	15
1.5 Penelitian Terdahulu.....	16
2. METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	20
3.1 Metode Penelitian	20
2.1.1 Model <i>Ordinary Least Squares</i> (OLS) dan <i>Spatial Auto Regressive</i> (SAR)	20
2.1.2 Indeks Moran, <i>Local Indicator of Spatial Autocorrelation</i> (LISA) dan <i>Moran Scatterplot</i>	23
3.2 Objek Penelitian	26

3.3	Data Penelitian	29
3.3.1	Jumlah Tindak Pidana Umum.....	30
3.3.2	PDRB per Kapita	32
3.3.3	Rasio Gini.....	33
3.3.4	Persentase Penduduk Miskin	35
3.3.5	Pengangguran Terbuka	37
3.3.6	Persentase Penyelesaian Kasus	38
3.3.7	Jumlah Personil Polisi.....	40
4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Hasil Pengolahan Data	42
4.1.1	Hasil Pengujian <i>Goodness of Fit</i> antara <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) dan <i>Spatial Auto Regressive</i> (SAR).....	42
4.1.2	Uji Asumsi Klasik	45
4.1.3	Hasil Pengujian Indeks Moran, <i>Moran Scatterplot</i> , dan <i>Local Indicator of Spatial Autocorrelation</i> (LISA).....	46
4.2	Pembahasan	54
5.	PENUTUP	59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	LAMPIRAN I: Hasil Estimasi <i>Ordinary Least Squares</i> (OLS)	A - 1
	LAMPIRAN II: Hasil Estimasi <i>Spatial Auto Regressive</i> (SAR).....	A - 5
	LAMPIRAN III: Uji Signifikansi Indeks Moran Global.....	A - 8
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	B - 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) di Indonesia Tahun 2012-2015	3
Gambar 2. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) di Polda Jawa Barat Tahun 2012-2015	4
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 4. Kurva Penawaran dan Permintaan Kejahatan.....	10
Gambar 5. <i>Rook Contiguity</i>	22
Gambar 6. <i>Moran Scatterplot</i>	25
Gambar 7. Peta Jawa Barat Berdasarkan Wilayah Administrasi	26
Gambar 8. Peta Vektor Wilayah Hukum Polda Jawa Barat Tanpa Polres Cimahi dan Polres Ciamis	28
Gambar 9. Perbandingan Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Polda Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2012-2015.....	28
Gambar 10. Perbandingan Jumlah Personil Polisi Riil dan DSP di Polda Jawa Barat Tahun 2012-2015	29
Gambar 11. Jumlah Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat Tahun 2012-2015.....	31
Gambar 12. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015.....	32
Gambar 13. Perbandingan Rasio Gini Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2012-2015	34
Gambar 14. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015.....	36
Gambar 15. Jumlah Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015 .	37
Gambar 16. Persentase Penyelesaian Kasus di Polda Jawa Barat Tahun 2012-2015	39
Gambar 17. Jumlah Personil Polisi di Polda Jawa Barat Tahun 2012-2015.....	40
Gambar 18. Hasil <i>Moran Scatterplot</i> Tahun 2012.....	48
Gambar 19. Hasil <i>Univariate</i> LISA Tahun 2012	48
Gambar 20. Hasil <i>Moran Scatterplot</i> Tahun 2013.....	49
Gambar 21. Hasil <i>Univariate</i> LISA Tahun 2013	50
Gambar 22. Hasil <i>Moran Scatterplot</i> Tahun 2014.....	51
Gambar 23. Hasil <i>Univariate</i> LISA Tahun 2014	51
Gambar 24. Hasil <i>Moran Scatterplot</i> Tahun 2015.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lima Kepolisian Daerah dengan Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) Tertinggi Tahun 2012-2015	4
Tabel 2. Tiga Kepolisian Daerah dengan Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik dengan Penggunaan Kekerasan dan Tanpa Kekerasan Tertinggi Tahun 2012-2015	5
Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. Wilayah Hukum Polda Jawa Barat	27
Tabel 5. Jumlah Tindak Pidana Umum di Polda Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015	31
Tabel 6. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015	33
Tabel 7. Rasio Gini Provinsi Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015	34
Tabel 8. Tiga Provinsi yang Memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi Tahun 2012-2015	35
Tabel 9. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015	36
Tabel 10. Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015	38
Tabel 11. Persentase Penyelesaian Kasus di Polda Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015	39
Tabel 12. Jumlah Personil Polisi di Polda Jawa Barat per Kabupaten/Kota Tahun 2012-2015	41
Tabel 13. Hasil Uji <i>Goodness of Fit</i> Tahun 2012-2015	44
Tabel 14. Hasil Estimasi Model OLS 2012, 2013 dan 2014	44
Tabel 15. Hasil Estimasi Model SAR 2015	44
Tabel 16. Hasil Uji Multikolinearitas Tahun 2012	45
Tabel 17. Hasil Uji Multikolinearitas Tahun 2013	45
Tabel 18. Hasil Uji Multikolinearitas Tahun 2014	46
Tabel 19. Hasil Uji Multikolinearitas Tahun 2015	46
Tabel 20. Hasil <i>Moran Scatterplot</i> Tindakan Kejahatan Hak Milik di Kabupaten/Kota Jawa Barat	53

Tabel 21. Tingkat Signifikansi Tindakan Kejahatan Hak Milik di Kabupaten/Kota Jawa Barat.....	54
---	----

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tindakan kejahatan atau kriminalitas merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia (BPS, 2017). Bentuk tindakan kejahatan yang bermotif ekonomi disebut sebagai kejahatan hak milik. Kejahatan hak milik terdiri atas tindakan pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, perusakan barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan (BPS, 2017). Kejahatan hak milik pada umumnya dilakukan oleh golongan *blue collar*¹ (lectlaw.com, n.d).

Perilaku kejahatan berkaitan dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi, namun ekonom cenderung mengabaikannya. Hal ini terlihat dari sedikitnya tema kejahatan dalam penelitian-penelitian ekonomi. Kejahatan sebagai kegiatan ilegal dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan tidak pantas untuk diteliti secara ilmiah dan sistematis (Becker, 1968). Tindakan kejahatan masih dianggap hanya berkaitan dengan yuridis-formal² dan sosiologis (Kartono, 1992 dalam Hardianto, 2009). Penelitian empiris dengan topik tindakan kejahatan yang dikaitkan dengan faktor sosial dan ekonomi diawali oleh Becker (1968). Kemudian Ehrlich (1973) mengembangkan *Crime Economic Model* (CEM) yang digunakannya untuk melakukan verifikasi terhadap hubungan antara tingkat kejahatan dan variabel-variabel sosial-ekonomi. Tindakan kejahatan merupakan bagian ekonomi karena termasuk perilaku individu yang membuat pilihan untuk mendapatkan pendapatan. Tindakan kejahatan sebagai pekerjaan ilegal dianggap sebagai substitusi dari pekerjaan legal. Model ekonomi kejahatan digambarkan dalam bentuk kurva penawaran dan permintaan. Penawaran kejahatan dibentuk oleh pelaku kejahatan, sedangkan permintaan kejahatan dibentuk oleh masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari kejahatan dan bentuk pencegahan kejahatan dari pemerintah (Becsi, 1999). Model ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa jumlah kejahatan merespon berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Keterkaitan antara faktor-faktor sosial-ekonomi dan tingkat kejahatan juga diperkuat oleh peneliti-peneliti berikutnya. Marselli dan Vannini (1997), Kapuscinski *et al.* (1998), Entorf dan Spengler (2000), Edmark (2005), menyatakan bahwa komposisi usia penduduk, ketimpangan pendapatan, dan terutama tingkat pengangguran dapat menjelaskan persistensi dan tingkat kejahatan. Pengangguran memiliki hubungan kuat

¹ orang biasa yang berasal dari kalangan ekonomi rendah

² tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum

dengan jumlah kejahatan. Tingkat kejahatan yang semakin tinggi diikuti oleh tingginya tingkat pengangguran (Philips *et al.*, 1972; Becsi, 1999; Bushway dan Reuter; 2001; Raphael dan Winter-Ebmer, 2001; Levitt, 2004; Francesca dan Uberti, 2008; Erdogan *et al.*, 2013; Nugroho dan Harmadi, 2015). Kelly (2000), dan Prayetno (2013) menyoroti pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tindakan kriminalitas properti atau harta benda. Seperti juga dilakukan oleh Reksohadiprodjo *et al.* (1985 dalam Hardianto, 2009) yang menyatakan bahwa kemiskinan, bersama-sama dengan terbatasnya kesempatan kerja memiliki pengaruh signifikan pada tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi atau tingkat pendapatan (Bernstein dan Houston, 2000). Penelitian Bernstein dan Houston (2000) membuktikan bahwa pembangunan ekonomi akan meningkatkan peluang (*opportunity*) individu untuk mendapatkan penghasilan dari sektor perekonomian legal dan oleh karena itu akan menurunkan tingkat kejahatan.

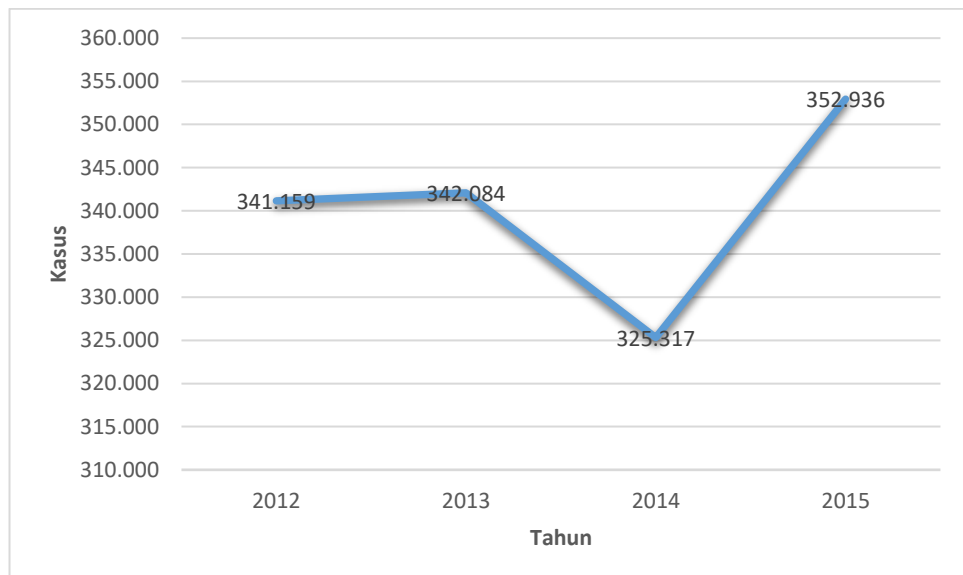
Di dalam melakukan analisis terhadap faktor-faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh pada tingkat kejahatan, para peneliti biasanya menggunakan asumsi dasar bahwa seorang individu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional untuk memaksimalkan utilitasnya. Penelitian Becker (1968) menyatakan bahwa pelaku kejahatan (terutama kejahatan properti) akan merespon insentif dan disinsentif hasil kejahatan. Jika pendapatan dari pekerjaan legal lebih besar dibanding *expected income* dari hasil kejahatan, maka seseorang yang rasional akan memilih tidak akan melakukan kejahatan. Sebaliknya, semakin besar penghasilan dari hasil kejahatan, akan semakin tinggi dorongan bagi individu untuk meninggalkan pasar tenaga kerja legal, sehingga akan meningkatkan jumlah tindakan kejahatan. Pengaruh pendapatan terhadap tingkat kejahatan tidak hanya dikemukakan oleh Becker (1968), tetapi juga oleh O'Sullivan (2007), dan Brueckner (2011 dalam Nugroho dan Harmadi, 2015). Selain pendapatan, ketimpangan pendapatan juga berpengaruh pada tingkat kejahatan. *Return* dari aksi kejahatan akan meningkat di daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi, sehingga kejahatan di daerah tersebut juga akan meningkat (Becker, 1968; Gentle, 1984; Kelly, 2000; Lederman *et al.*, 2001).

Di sisi lain, hukuman terhadap tindak kejahatan dapat dianggap sebagai disinsentif. Semakin berat hukuman penjara bagi pelaku kejahatan, akan semakin mengurangi jumlah individu yang terlibat dalam perbuatan kriminal, sehingga jumlah kejahatan berkurang. Selain hukuman, jumlah polisi juga dapat berpengaruh pada jumlah kejahatan. Semakin besar jumlah personil polisi maka semakin besar peluang pelaku kejahatan untuk tertangkap sehingga menurunkan jumlah orang yang hendak melakukan kejahatan (Levitt dan Miles, 2006).

Tindak kejahatan juga berkaitan erat dengan isu keruangan (spasial). Terdapat hubungan antara perbedaan jumlah kejahatan dengan beberapa parameter sosial-ekonomi (Hsieh dan Pugh, 1993; Ichiro *et al.*, 1999 dalam Francesca dan Uberti, 2008; Erdogan *et al.*, 2013). Banyak akademisi yang memerhatikan ketimpangan wilayah dalam hal pembangunan ekonomi, namun literatur empiris ekonomi tidak memerhatikan perbedaan tingkat kejahatan antar-wilayah (Hsieh dan Pugh, 1993; Ichiro *et al.*, 1999 dalam Francesca dan Uberti, 2008). Analisis spasial terhadap kejahatan dilakukan berdasarkan pada anggapan bahwa kejadian kejahatan hak milik di suatu wilayah biasanya akan terkait dengan kejadian kejahatan di wilayah lain yang lokasinya berdekatan (bertetangga) (Nugroho dan Harmadi, 2015). Dengan melakukan analisis spasial, identifikasi tentang lokasi dari aktivitas pelaku kejahatan dan pergerakan pelaku kejahatan, dapat diketahui. Melalui ekonometrika spasial, faktor penentu (determinan) kejahatan dapat diketahui secara empiris dengan mempertimbangkan lokasi kejahatan.

Tingkat kejahatan di Indonesia selama tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif. Jumlah kejahatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat, kemudian menurun di tahun 2014, namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2015 (Gambar 1). Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut adalah: 341.159 kasus, 342.084 kasus, 325.317 kasus, dan 352.936 kasus.

Gambar 1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) di Indonesia Tahun 2012-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun (diolah)

Jawa Barat sebagai wilayah kerja Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat merupakan provinsi yang selalu masuk lima besar wilayah dengan jumlah kejahatan

tertinggi se-Indonesia pada tahun 2012-2015 (Tabel 1). Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 2012, 2013 dan 2014, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah kejahatan nomor tiga terbanyak di Indonesia, dan peringkatnya membaik satu tingkat di tahun berikutnya.

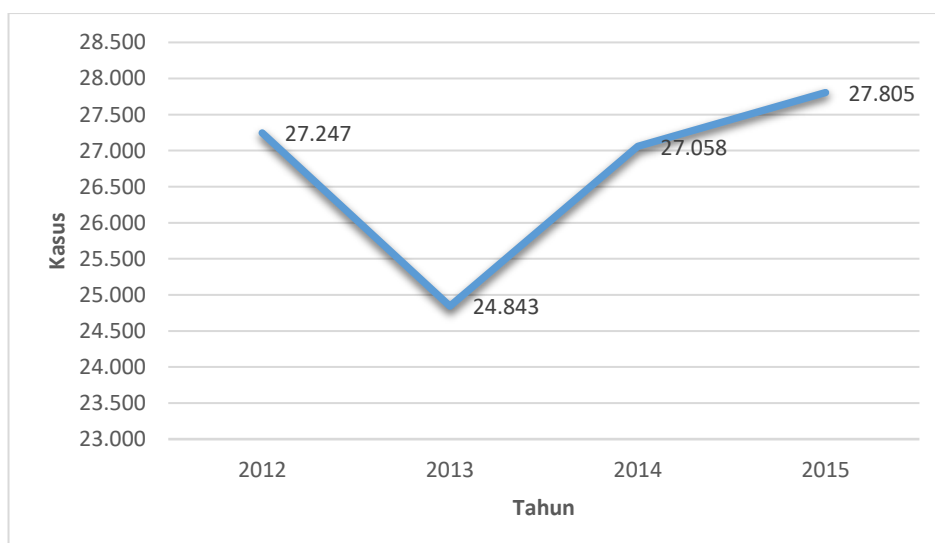
Tabel 1. Lima Kepolisian Daerah dengan Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Tertinggi Tahun 2012-2015

Urutan	Tahun							
	2012		2013		2014		2015	
	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan
1	Metro Jaya	52.642	Metro Jaya	49.498	Metro Jaya	44.298	Metro Jaya	44.461
2	Sumatera Utara	33.250	Sumatera Utara	40.709	Sumatera Utara	35.728	Jawa Timur	35.437
3	Jawa Barat	27.247	Jawa Barat	24.843	Jawa Barat	27.058	Sumatera Utara	35.248
4	Banten	22.774	Sumatera Selatan	22.882	Sumatera Selatan	22.708	Jawa Barat	27.805
5	Bengkulu	21.498	Sulawesi Selatan	17.124	Jawa Tengah	15.993	Sumatera Selatan	20.575

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun (diolah)

Jumlah kejahatan yang dilaporkan di wilayah kerja Polda Jawa Barat selama kurun waktu antara tahun 2012 dan 2015, memiliki *trend* yang fluktuatif (Gambar 2). Jumlah kejahatan yang dilaporkan di wilayah Polda Jawa Barat menurun dari tahun 2012 ke 2013, namun mengalami peningkatan di tahun 2014 dan tahun 2015.

Gambar 2. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) di Polda Jawa Barat Tahun 2012-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun (diolah)

Berdasarkan klasifikasi kejahatan, Polda Jawa Barat termasuk tiga besar wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan hak milik tertinggi se-Indonesia pada tahun 2012-2015 (Tabel 2). Dua tahun pertama, 2012 dan 2013, jumlah kejahatan hak milik dengan kekerasan dan tanpa kekerasan di wilayah Polda Jawa Barat adalah 12.931 kasus dan 11.988 kasus, berada di urutan ketiga terbesar di Indonesia. Tahun 2014, jumlah kejahatan hak milik di Polda Jawa Barat meningkat menjadi 12,875 kasus, dan menduduki peringkat kedua terbesar di Indonesia. Tahun 2015, meskipun jumlah kejahatan hak milik di Polda Jawa Barat menurun menjadi 10.910 kasus, tetapi peringkat Jawa Barat tidak berubah dari urutan kedua.

Tabel 2. Tiga Kepolisian Daerah dengan Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik dengan Penggunaan Kekerasan dan Tanpa Kekerasan Tertinggi Tahun 2012-2015

Urutan	Tahun							
	2012		2013		2014		2015	
	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan
1	Sumatera Utara	16.529	Sumatera Utara	19.531	Sumatera Utara	17.326	Sumatera Utara	15.371
2	Metro Jaya	15.806	Metro Jaya	13.886	Jawa Barat	12.875	Jawa Barat	10.910
3	Jawa Barat	12.931	Jawa Barat	11.988	Metro Jaya	11.079	Metro Jaya	9.755

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun (diolah)

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai kejahatan dari perspektif ekonomi diperlukan di Indonesia karena masih terbatasnya studi mengenai perilaku kejahatan dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Padahal, jumlah tindakan kejahatan hak milik di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan spasial. Analisis jumlah tindakan kejahatan hak milik di suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan alat ekonomi seperti adanya penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) kejahatan serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi penawaran dan permintaan kejahatan. Kejahatan hak milik dianalisis dengan aspek spasial karena kejadian kejahatan hak milik di suatu wilayah dapat terkait dengan kejadian kejahatan di wilayah lainnya yang berdekatan.

Pada tahun 2012-2015 wilayah Polda Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kejahatan hak milik peringkat tiga besar di Indonesia. Tindakan kejahatan di wilayah Polda Jawa Barat erat kaitannya dengan faktor pencegahan yang dilakukan oleh

kinerja dan jajaran personil Polda Jawa Barat. Selain faktor pencegahan, terdapat faktor lain yang memengaruhi tindakan kejahatan di wilayah Polda Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan indikator lain yang dapat melengkapi alasan tindakan kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat, seperti faktor sosial-ekonomi. Pada latar belakang di atas dinyatakan bahwa faktor sosial-ekonomi dapat menjelaskan perbedaan jumlah kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah variabel sosial-ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah tindak kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat?
2. Apakah terdapat ketergantungan spasial dalam kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel sosial-ekonomi yang signifikan memengaruhi tindakan kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai pentingnya mengaitkan faktor sosial-ekonomi terhadap tindakan kejahatan hak milik. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat ketergantungan spasial dalam kasus kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh sosial-ekonomi dan ketergantungan spasial kejahatan hak milik yang ada di wilayah Polda Jawa Barat.

1.4 Kerangka Pemikiran

Analisis spasial tindakan kejahatan melalui pendekatan ekonomi dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ditunjukkan oleh Gambar 3. Tindakan kejahatan hak milik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan faktor pencegahan tindakan kejahatan. Penulis memilih enam variabel yang diduga sebagai determinan kejahatan hak milik di Jawa Barat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menurut kabupaten/kota, rasio gini per kabupaten/kota, persentase penduduk miskin per kabupaten/kota, jumlah pengangguran per kabupaten/kota, jumlah personil polisi per Polres atau kabupaten/kota, dan persentase penyelesaian kasus tindakan kejahatan per Polres atau kabupaten/kota. Variabel independen tersebut diperkirakan memengaruhi variabel dependen yaitu jumlah tindakan kejahatan hak milik di Polda Jawa Barat. Setelah menentukan determinan kejahatan hak milik di wilayah Polda Jawa Barat, maka perlu dilakukan analisis spasial dari tindakan kejahatan hak milik di Polda Jawa Barat.

Gambar 3. Kerangka Pemikiran

